

Suatu Wacana mengenai Paradigma Pembangunan di Indonesia

Aris Ananta

Untuk *Radar Banjarmasin*, 12 Maret 2008

Tulisan pendek ini sekedar memberikan satu, dari sekian banyak, wacana mengenai paradigma pembangunan yang sebaiknya dilaksanakan di Indonesia. Perlu disebutkan bahwa wacana dalam tulisan pendek ini juga masih merupakan suatu pemikiran awal, yang masih terus dalam penggodokan. Walau begitu, tulisan ini diharapkan dapat mendorong kita semua untuk terus melakukan berbagai pengkajian mengenai paradigma pembangunan.

Globalisasi dan Regionalisasi

Globalisasi tak terelakkan lagi. Walau begitu, para pengusaha multi nasional mulai mengalami kejenuhan. Mereka ingin menciptakan sesuatu yang lebih khas. Mereka mulai masuk ke region, pengelompokan beberapa negara. Di pihak lain, tidak semua orang dapat mengikuti arus globalisasi. Pengusaha kecil dan menengah sering kesulitan melawan globalisasi. Jalan yang lebih mudah adalah membentuk regionalisasi, kerjasama ekonomi antara beberapa daerah. Kerjasama dapat terjadi sebagai kerjasama antara beberapa daerah dalam suatu negara, antar negara, atau kedua duanya. Otonomi regional tidak berarti tiap daerah bekerja sendiri sendiri dan melupakan keterkaitan dan kerjasama dengan daerah lain.

Dengan kata lain, regionalisasi tampaknya merupakan salah satu cara menarik untuk meningkatkan perekonomian, baik dari sisi pengusaha multi-nasional mau pun pengusaha menengah dan kecil.

Menjadi menarik, bila kita memikirkan paradigma pembangunan dalam konteks regionalisasi dan globalisasi. Salah satu pemikiran yang perlu dikaji lebih jauh dan lebih

mendalam adalah kemungkinan melakukan *Borneo Regional Economic Cooperation*, meliputi semua propinsi ke Kalimantan, Sabah dan Serawak di Malaysia, dan Brunei.

Dalam kaitan dengan globalisasi, salah satu tantangan yang kini banyak dialami di banyak negara, termasuk Indonesia, adalah adanya gejala "*global consumers, local earners*". Masyarakat mengkonsumsi barang dan jasa dengan standar dunia dan harga dunia, tetapi masyarakat masih berpenghasilan lokal. Untuk negara seperti Jepang, gejala ini menguntungkan karena harga dan gaji mereka tinggi untuk ukuran dunia. Untuk negara seperti Indonesia, gejala ini membuat orang Indonesia mengalami kesulitan dalam persaingan internasional.

Indikator Pembangunan

Di tahun 2007, ekonomi Indonesia tumbuh dengan 6,3%. Di Kalimantan Selatan, sekitar 6.0%. Angka ini baik atau buruk, tinggi atau rendah? Sudah di atas sebelum krisis atau belum? Adakah peningkatan dalam investasi asing? Bagaimana iklim investasi di Indonesia, bagaimana iklim investasi di Kalimantan Selatan? Bagaimana dengan ekspor kita? Kapan pendapatan per kapita kita mencapai, katakan US\$25,000, seperti yang dicapai negara maju?

Pertanyaan seperti itu sangat lazim kita dengar untuk menilai pembangunan ekonomi kita. Di balik pertanyaan itu ada suatu paradigma pembangunan, bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama pembangunan, bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan hal terpenting dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila muncul anggapan bahwa makin tinggi pertumbuhan ekonomi, makin berhasil pembangunan ekonomi. Kalau bisa, menurut anggapan ini, perekonomian tumbuh mendekati 10% atau bahkan di atas 10%, seperti yang terjadi dengan China, India, atau Viet Nam. Hal hal lain menjadi pelengkap indikator pertumbuhan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia kini makin populer, namun ia juga digunakan sekedar sebagai pelengkap indeks pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita.

Inti utama catatan ini adalah bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita bukanlah indikator utama dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi

dan pendapatan per kapita hanyalah salah satu alat untuk mencapai hal yang lebih tinggi, yang lebih utama, yang seyogyanya menjadi tujuan utama pembangunan di Indonesia. Ada tiga konsep utama, yang ketiga-tiganya sama pentingnya. Ketiga hal itu adalah *people centered development*, *environmentally friendly development*, dan *good governance*. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita adalah salah satu alat, bukan tujuan dan bukan satu satunya alat, untuk mencapai ketiga hal tersebut di atas.

People Centred Development

Ada empat unsur utama dalam *people centred development*. Pertama, kesehatan penduduk. Sehat tidak sekedar hidup lama, tetapi juga hidup sehat, hidup aktif, dan hidup independen (bukan tergantung pada orang lain untuk kegiatan sehari hari). Salah satu contoh yang mendapat perhatian dalam konsep ini adalah “seberapa sehatkah kita semua?” Apakat kita sakit sakitan? Apakah kita tergantung obat? Kalau kita sehat, tidak sakit sakitan, hidup kita menjadi lebih produktif. Kita juga tidak menghabiskan uang untuk obat. Dengan paradigma ini, pertumbuhan industri obat obatan yang tinggi belum tentu merupakan hal yang positif untuk pembangunan. Mungkin, program yang mendorong dan memungkinkan orang berjalan kaki dengan aman, murah, dan sehat, menjadi jauh lebih penting daripada kebijakan yang mendorong pertumbuhan industri farmasi.

Kedua, penduduk yang pandai. Pandai tidak hanya diukur dengan gelar pendidikan. Pendidikan lebih daripada sekedar mesin industri atau bisnis. Penduduk yang pandai adalah penduduk yang mempunyai informasi luas mengenai apa yang terjadi di sekelilingnya. Konsumen yang tahu apa yang mereka konsumsi. Rakyat yang tahu apa yang akan dilakukan oleh pemimpin mereka. Di sini, konsep **Aku Cinta Konsumen Indonesia** menjadi amat penting, jauh lebih penting daripada Aku Cinta Produksi Indonesia. Proses demokratisasi yang kini sedang berjalan di Indonesia merupakan suatu sarana yang ampuh untuk memandaikan penduduk. Hal ini juga berkaitan erat dengan “*partisipasi masyarakat*”, sebagai salah satu unsur utama *good governance*, yang akan dibahas kemudian.

Ketiga, penduduk yang mempunyai kemampuan berpindah, kemana pun dia akan pergi, untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Mampu berpindah bukan sekedar karena peraturan pemerintah, namun juga adanya kemampuan dan fasilitas dari pemerintah/ masyarakat, seperti transportasi dan komunikasi. Apakah penduduk sudah mempunyai pasar geografis yang luas, baik untuk bekerja mau pun untuk hidup? Apakah penduduk Banjarmasin dapat dengan mudah, murah, dan cepat pergi ke Pontianak, tanpa harus melewati Jakarta? Apakah penduduk Indonesia masih “dilarang” pergi ke luar negeri, dengan adanya biaya fiskal, yang sangat jarang ditemukan di negara lain? Siapkah masyarakat untuk menjadi makin ”mobile” baik di dalam negeri mau pun luar negeri?

Selain adanya kebebasan dan peningkatan kemampuan untuk pindah, kita juga perlu memikirkan kesiapan penduduk yang tidak berniat pindah. Siapkah masyarakat menerima penduduk dari daerah lain, baik dari Indonesia mau pun dari luar Indonesia? Siapkah masyarakat memanfaatkan ”orang orang mereka” yang berada di luar daerah mereka? Siapkah masyarakat memanfaatkan ”orang orang lain” yang datang ke daerah mereka?

Keempat, penduduk yang memiliki rasa aman, bebas dari rasa takut. Rasa takut ini bermacam macam. Dari keamanan di rumah, di tempat umum. Apakah dapat bepergian dan berusaha dengan aman, tidak takut copet, rampok? Kepastian hukum juga penting. Kalau hukum/ peraturan selalu berubah, orang akan takut bekerja, karena takut salah. Adanya polisi informal, atau preman, juga membuat ketidakpastian dalam masyarakat. Keamanan seyogyanya menjadi *public good*, bukan jasa yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang mempunyai uang. Dengan adanya rasa aman, orang akan makin produktif. Selain itu, rasa aman itu sendiri merupakan salah satu tujuan pembangunan.

Environmentally Friendly Development

Hidup kita tidak terpisahkan dari lingkungan kita. Pembangunan yang merusak lingkungan adalah pembangunan yang justru merusak hidup kita. Itu sebabnya, kerusakan lingkungan harus diperhitungkan dalam perhitungan pendapatan nasional dan regional. Dalam istilah teknis ekonomi, kita harus menghitung depresiasi dalam tiap produksi kita. Teknik ini juga terdapat dalam perhitungan pendapatan nasional dan regional, tetapi

hampir tidak mendapat perhatian. Maka, perhitungan pendapatan nasional dengan memasukkan depresiasi, terutama karena kerusakan lingkungan, menjadi mutlak.

Sudah bersihkan udara kita, sudah sehat? Termasuk, apakah udara kita dicemari oleh asap dari kebakaran hutan dan rokok? Perlu kita perhitungkan kerusakan lingkungan (karena asap rokok) dan kita bandingkan dengan keuntungan finansial dari industri rokok. Udara bersih merupakan hal utama dalam kehidupan kita. Sudahkah kita mudah mendapatkan udara bersih dan murah?

Sudah bersihkan air kita? Bisakah kita minum langsung tanpa harus merebus lebih dahulu? Air untuk wudhu sudah bersih?

Hutan kita makin gundul? Sumberdaya alam kita makin habis, tanpa kita dapat memperbarui? Kapan batu bara kita habis? Selama ini kita gunakan untuk apa? Bagaimana dengan banjir, gempa? Dampaknya apa? Ini semua harus diperhitungkan dalam estimasi pendapatan nasional/ regional.

Good Governance

Diskusi mengenai *good governance* berkaitan dengan proses pembuatan keputusan dan penerapan keputusan tersebut. Hal ini berurusan dengan kegiatan pemerintahan, kegiatan bisnis, kegiatan sosial, dan berbagai macam kegiatan lainnya. *Good governance* bukan sekedar alat dalam pembangunan, tetapi menjadi salah satu tujuan pembangunan.

Banyak ukuran telah dikembangkan. Namun, ada tiga hal utama yang akan dibahas di sini. Pertama, *accountability*. Dalam tiap usaha yang kita lakukan, dapatkah kita mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan? Tanggung jawab diberikan kepada "pemilik" ("*stakeholder*") usaha itu. Hal yang paling utama dalam *accountability* berkaitan dengan *financial accountability*. Dalam kaitan dengan lembaga pelayanan umum dan perusahaan milik negara, "pemilik" adalah masyarakat secara luas.

Accountability ini hanya dapat dilakukan bila ada *transparency*, yang merupakan unsur utama kedua dalam *good governance*. Seluruh proses pembuatan keputusan dan penerapannya dapat diketahui oleh "pemilik" usaha. *Transparency* menjadi bermanfaat ketika terdapat partisipasi masyarakat, yang merupakan unsur utama ketiga dalam *good*

governance. Masyarakat akan dapat melakukan partisipasi yang efektif bila masyarakat pandai. Keterbukaan informasi menjadi ciri penting masyarakat yang pandai dan melakukan *good governance*.

Pencapaian demokrasi yang matang (*mature democracy*) menjadi tujuan penting dalam *good governance*, tercermin dari unsur partisipasi masyarakat. Semakin pandai suatu masyarakat, akan semakin bermutu dan efektif partisipasi masyarakat tersebut. Hal ini akan mendorong tercapainya kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya. Perlu diingat, bahwa partisipasi masyarakat tidak sekedar kebebasan menuntut, tetapi juga rasa tanggung jawab. Suatu contoh, masyarakat perlu belajar untuk menjadi “pekalah yang baik” (*good loser*). Kalau bertanding dalam pemilihan umum atau pilkada, dan kemudian kalah, kita harus belajar menerima dan mengucapkan selamat pada pemenang, dan bukan kemudian mengkritik peraturan dan marah. Ketika kalah, dapatkah kemudian menerima calon yang menang? Untuk yang menang, dapatkah menerima kemenangan dengan sewajarnya?

Dalam kaitan ini menarik untuk dibicarakan perbedaan antara lembaga/ institusi bisnis and lembaga/ institusi pelayanan umum, atau campuran dua duanya. Apa pun, suatu insitusi harus jelas, transparan, mengenai tujuannya: lembaga bisnis atau lembaga pelayanan umum.

Lembaga bisnis harus mempunyai tanggung jawab sosial, walau tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan. Lembaga bisnis bertujuan memaksimalkan keuntungan, namun ia harus mempunyai tanggung-jawab sosial. Tanggun jawab sosial ini bukan sekedar tanggung jawab pada kerusakan lingkungan, tetapi lebih luas dari itu. Apakah bisnis mereka menyebabkan orang sakit? Apakah bisnis mereka membodohkan masyarakat? Apakah bisnis mereka menyebabkan orang sulit berpindah? Apakah bisnis mereka menciptakan rasa tidak aman? Pendeknya, bisnis harus mempunyai tanggung jawab dalam penciptaan *people centered development* dan *environmentally friendly development*.

Lembaga pelayanan umum bertujuan memaksimalkan pelayanan sosial yang berkualitas. Walau begitu, lembaga pelayanan umum juga harus dilakukan secara bisnis, agar dapat berkelanjutan. Lembaga pelayanan umum tidak harus mendapatkan

subsidi. Diusahakan agar dapat mandiri, walau pun tujuannya bukan memaksimalkan keuntungan. Dalam bahasa teknis ekonomi, lembaga bisnis berusaha agar penerimaan lebih besar dari pengeluaran dan mencoba memaksimalkan keuntungan, yang merupakan perbedaan antara penerimaan dengan pengeluaran. Dalam lembaga pelayanan umum, yang diusahakan adalah sekedar bahwa pengeluaran telah ditutup dengan penerimaan. Kalau ada kelebihan dalam penerimaan, usaha diperluas lagi, karena kelebihan tersebut dapat meningkatkan pelayanan umum.

Tentu saja, lembaga pelayanan umum dapat pula beroperasi secara "rugi", kalau memang masyarakat dan pemerintah bersedia untuk terus menerus memberikan subsidi pada lembaga ini.

Penutup

Semoga tulisan pendek ini dapat menggugah kita semua untuk terus mengkaji dan mencari paradigma pembangunan untuk Indonesia. Yang dibahas di sini hanya lah salah satu wacana. Wacana ini pun masih harus terus dikembangkan, untuk mengembangkan berbagai indikator yang lebih nyata. Selain itu, masih banyak wacana lain, yang semuanya dapat dikembangkan dan dikaji lebih lanjut. (*)